

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Cianjur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

NUR ANISA HASANAH

NPM : C10160152



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Cianjur)

NUR ANISA HASANAH

NPM : C10160152

Bandung, 12 Maret 2020

Pembimbing



Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi



Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP



Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

P E R N Y A T A A N

PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 30 Januari 2020

Nur Anisa Hasanah

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cianjur)**

Ditulis oleh:
Nur Anisa Hasanah
C10160152

Pembimbing:
Nurul Fatimah, S.Pd,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah sedangkan variabel dependen dari variabel ini adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan yaitu melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan *software SPSS V25.0*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan arah positif.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

***THE EFFECT OF THE GOVERNMENT'S INTERNAL CONTROL SYSTEM
ON THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT***

(Study on Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur)

Written by :

**Nur Anisa Hasanah
C10160152**

Preceptor :

Nurul Fatimah, S.Pd,M.Si

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the government's internal controlsystem on the effectiveness of regional financial management. The independent variable in this research is the government's internal control system while the dependent variable of this variable is the effectiveness of regional financial management. This research was conducted at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

This research was conducted using descriptive and verification methods. The sampling technique in this research is to use a purposive sampling technique. Data collection is carried out through questionnaires. The analytical method used is a simple linear regression analysis with the help of SPSS V25.0 software.

Based on the results of the research showed that the government's internal control system has a significant effect on the effectiveness of regional financial management in a positive direction.

Keywords: Government's Internal Control System, and Effectiveness Of Regional Financial Management.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Sallallahu'alaihi Wasallam* sebagai suri tauladan yang baik, juga kepada keluarganya, sahabantnya, tabiin dan tabiatnya, serta kepada ummatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawanya.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. Judul yang penulis ajukan adalah “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah” (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur).

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah membantu serta memberi motivasi hingga selesainya penelitian ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang paling penulis sayangi dan cintai, Bapak Usna Sunarwan dan Ibu Tintin Hasanah serta kakak tercinta M. Arifin yang selalu sabar memberikan semangat, do'a, motivasi, serta bimbingan baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya yang selama ini penulis dapatkan

selama proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

2. Nurul Fatimah, S.Pd, M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmunya serta arahan dan motivasi yang membangun dan telah memberikan waktu luangnya untuk membimbing penulis selama penyusunan penelitian ini serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc, CSP., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.
4. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM., selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekuitas (STIE) EKUITAS Bandung.
6. Dr. H. Herry Achmad Buchory, SE., MM., selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) EKUITAS Bandung.
7. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
8. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi STIE Ekuitas.
9. Dani Ramdani, SE., M.Ak selaku dosen wali S1 Akuntansi 4 yang selalu memberikan arahan dan solusi pada penulis.
10. Seluruh dosen pengajar program studi S1 Akuntansi, yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi kepada penulis untuk menjadi bekal selama kegiatan perkuliahan.

11. Terimakasih kepada teman-teman tercinta yakni Indriyani, Renisa Aprilia, Shyka Silbianti, Junitasari, Tika Sartika, dan Hilma yang telah setia menemani, sabar membantu, memberikan semangat dan menghibur penulis selama menjalani proses perkuliahan ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman kosan yakni Intan Komariah, Nanda Septiani dan Dian Andriani yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi 4 yang telah memberi semangat serta motivasi selama proses perkuliahan.
14. Terimakasih kepada Teman-teman yang sejak SMA telah setia membantu, menyemangati dan memberi saran serta motivasi bagi penulis selama ini yakni Syifa , Ai Yuni, Ai Rismawati, Sri, Dwi, Resti,dan Jenita
15. Terimakasih kepada HIMASI yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi penulis selama masa perkuliahan.

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

“Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu.”

(HR. Abu Daud, no. 3641; Ibnu Majah, no. 223)

Bandung, 30 Januari 2020

Penulis

(Nur Anisa Hasanah)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN SARJANA

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah Penelitian | 6 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.3.1 Maksud Penelitian..... | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis | 7 |
| 1.4.2 Kegunaan Secara Praktis..... | 7 |
| 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 8 |
| 1.5.1 Lokasi Penelitian..... | 8 |
| 1.5.2 Waktu Penelitian..... | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN | |
| HIPOTESIS..... | 9 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 9 |
| 2.1.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 9 |
| 2.1.1.1 Pengertian Sistem | 9 |
| 2.1.1.2 Pengertian Pengendalian Internal | 9 |
| 2.1.1.3 Pengertian Sistem pengendalian internal Pemerintah | 10 |
| 2.1.1.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah..... | 10 |
| 2.1.1.5 Komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 10 |
| 2.1.1.6 Komponen pengendalian internal COSO | 14 |
| 2.1.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah..... | 18 |
| 2.1.2.1 Pengertian Efektivitas..... | 18 |
| 2.1.2.2 Pengertian Keuangan Daerah | 19 |
| 2.1.2.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah..... | 19 |
| 2.1.2.4 Ruang Lingkup Keuangan Daerah | 19 |
| 2.1.2.5 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah | 20 |
| 2.2 Penelitian Sebelumnya | 21 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 22 |
| 2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 22 |
| 2.4 Hipotesis..... | 25 |
| BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN..... | 26 |

| | | |
|---------|---|----|
| 3.1 | Objek Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan | 26 |
| 3.1.1 | Objek Penelitian..... | 26 |
| 3.1.2 | Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur | 26 |
| 3.1.2.1 | Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur | 26 |
| 3.1.2.2 | Susunan Organisasi | 26 |
| 3.2 | Metode Penelitian..... | 28 |
| 3.2.1 | Metode yang digunakan | 28 |
| 3.2.2 | Operasionalisasi Variabel Penelitian | 29 |
| 3.2.3 | Populasi dan Sampel Penelitian | 30 |
| 3.2.3.1 | Populasi Penelitian | 30 |
| 3.2.3.2 | Sampel Penelitian | 30 |
| 3.2.4 | Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.2.4.1 | Sumber Data | 32 |
| 3.2.4.2 | Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.2.5 | Metode Pengujian Data..... | 33 |
| 3.2.5.1 | Uji Validitas | 34 |
| 3.2.5.2 | Uji Realibilitas..... | 35 |
| 3.2.5.3 | Method of Successive Interval (MSI)..... | 36 |
| 3.2.6 | Uji Asumsi Klasik..... | 37 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 3.2.7 | Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis | 39 |
| 3.2.7.1 | Metode Analisis..... | 39 |
| 3.2.7.2 | Pengujian Hipotesis | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 43 |
| 4.1 | Hasil Pengujian Instrumen Penelitian | 43 |
| 4.1.1 | Karakteristik Responden..... | 43 |
| 4.1.2 | Hasil Uji Validitas..... | 44 |
| 4.1.3 | Hasil Uji Reliabilitas..... | 46 |
| 4.1.4 | Metode Suksesif Interval (MSI)..... | 47 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 48 |
| 4.2.1 | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah..... | 48 |
| 4.2.2 | Hasil Pengujian Asumsi Klasik | 55 |
| 4.2.3 | Analisis Regresi Linier Sederhana..... | 59 |
| 4.2.4 | Analisis Koefisien Determinasi | 60 |
| 4.2.5 | Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian | 61 |
| 4.3 | Pembahasan | 63 |
| 4.3.1 | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur | 63 |
| 4.3.2 | Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur | 64 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 66 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 68 |
| 5.2 Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Cianjur | 2 |
| Tabel 1.2 Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2018 | 3 |
| Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 21 |
| Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel | 29 |
| Tabel 3.2 Sampel Penelitian | 31 |
| Tabel 3.3 Penilaian Skala Likert | 33 |
| Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 43 |
| Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 43 |
| Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 44 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah..... | 45 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah..... | 46 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 47 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 47 |
| Tabel 4.8 Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden | 49 |
| Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 49 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.10 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah..... | 52 |
| Tabel 4.11 Kolmogrov Smirnov Uji Normalitas..... | 58 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser..... | 59 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana | 60 |
| Tabel 4.14 Analisis Koefisien Determinasi | 61 |
| Tabel 4.15 Hasil Uji t (Parsial) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 25 |
| Gambar 4.1 Garis Kontinum Kategori Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | 52 |
| Gambar 4.2 Garis Kontinum Kategori Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 55 |
| Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot | 56 |
| Gambar 4.4 Histogram Uji Normalitas | 57 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK bimbingan skripsi
- Lampiran 2 Formulir pengajuan penulisan skripsi
- Lampiran 3 Surat permohonan perubahan topik/judul skripsi
- Lampiran 4 *Photocopy* kartu bimbingan
- Lampiran 5 Surat izin penyebaran kuesioner
- Lampiran 6 Kuesioner penelitian
- Lampiran 7 Tabulasi data
- Lampiran 8 Data transformasi
- Lampiran 9 *Output* SPSS versi 25
- Lampiran 10 Daftar tabel uji-r
- Lampiran 11 Daftar tabel uji-t
- Lampiran 12 Lembar persetujuan perbaikan (revisi) skripsi
- Lampiran 13 Surat Keterangan Revisi
- Lampiran 14 Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam otonomi daerah pemerintah dituntut untuk melaksanakan pemerintahan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program pemerintahan, namun pada kenyataannya pemerintah dalam mengelola keuangan daerah saat ini masih belum menjalankan fungsi dan peranan secara efektif oleh karena itu dibutuhkan suatu pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan efektivitas untuk mencapai program-program yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi menjadi lebih baik.

Pengelolaan keuangan yang efektif dapat dicapai dengan melakukan pengelolaan sumber daya keuangan dengan sebaik mungkin dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terjadi apabila pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan *output* program yang baik yang sesuai dengan tujuan program. Efektivitas adalah suatu ukuran didalam suatu perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, maka jika organisasi tersebut telah mencapai tujuan dari kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan tersebut telah berjalan dengan efektif (Halim dan Khusufi,2014:130).

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan tahapan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah (Siregar,2018:12). Adapun prinsip-prinsip didalam

pengelolaan pengeluaran daerah diantaranya yaitu : akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian (Halim dan Kusufi, 2012: 29).

Namun pada kenyataannya masih terdapat pengelolaan keuangan daerah yang belum efektif dikarenakan masih terdapat pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seperti yang terjadi pada pemerintah kabupaten Cianjur yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan di temukanya 11 temuan pemeriksaan.

Diketahui sebelumnya pemerintah kabupaten Cianjur telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 hingga 2017 secara berturut-turut, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Tabel 1.1
Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Cianjur

| Tahun | Opini |
|-------|---------------------------|
| 2014 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2015 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2016 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2018 | Wajar Dengan Pengecualian |

(Sumber: bandung.bpk.go.id)

Di dalam pemeriksaan BPK pada tahun 2018 ditemukan 11 temuan hasil pemeriksaan pada pemerintah kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
tahun 2018

| No | Temuan |
|----|---|
| 1. | Realisasi DAK digunakan bukan untuk pengadaan sarana dan prasarana SMP yang dilaksanakan tidak dengan semestinya. |
| 2. | Pengelolaan Pajak Daerah Belum Memadai, Hasil pemeriksaan menunjukkan WP Hotel, restoran, hiburan, mineral, dan parkir tidak seluruhnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan membayar penuh pajaknya. |
| 3. | Pengelolaan Utang Jangka Pendek Pada RSUD Cimacan Belum Memadai. |
| 4. | Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Sebesar Rp 23.320.781.411,00 |
| 5. | Pengelolaan aset tetap belum memadai yang disebabkan oleh adanya Aset tetap belum seluruhnya memiliki bukti kepemilikan. |
| 6. | Pengelolaan kas belum memadai yang disebabkan oleh adanya Transaksi non tunai belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan, rekening dana DAK milik sekolah negeri belum ditetapkan dan adanya pajak bunga dan biaya administrasi pada rekening sekolah negeri TA 2018 yang tidak sesuai dengan peraturan. |
| 7. | Pengelolaan persediaan pada beberapa OPD belum tertib yang disebabkan oleh adanya Penyajian nilai persediaan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi daerah, dan terdapat persediaan yang masih tercatat namun sudah tidak ada barangnya. |

| No | Temuan |
|-----|---|
| 8. | Pengelolaan belanja hibah Kabupaten Cianjur belum memadai disebabkan adanya Laporan penggunaan dana hibah dengan nilai lebih dari satu miliar rupiah belum diaudit oleh Akuntan Publik atau inspektorat daerah Kabupaten Cianjur. |
| 9. | Pengelolaan retribusi IMB belum memadai disebabkan karena terdapat potensi kekurangan penerimaan retribusi IMB |
| 10. | Pengelolaan pajak bumi dan bangunan belum memadai disebabkan karena terdapat “Data Baru” pada tahun 1994-2017 di rincian piutang PBB. |
| 11. | Pengelolaan aset lain-lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) , terdapat aset lain-lain tahun pengadaan 2009 yang tidak jelas. |

Sumber: LKPD Kab Cianjur 2018

Didalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi. Sistem pengendalian internal mencakup beberapa tujuan meliputi struktur dari organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan dengan lan tujuan untuk menjaga aset organisasi, memastikan adanya ketelitian dan keandalan dalam mengelola data akuntansi, dan mendorong tercapainya efisiensi dan menciptakan lingkungan yang patuh terhadap kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2016:129).

Sistem pengendalian internal juga dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian internal setiap program dapat dilaksanakan sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu pemerintah mengatur adanya sistem pengendalian internal (SPIP) untuk menunjang efektivitas dalam pencapaian program-program pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Beberapa kasus seperti terjadinya kasus korupsi, inefisiensi dalam organisasi dan kualitas laporan keuangan, penyelewengan keuangan Negara, dan pemborosan anggaran dapat disebabkan karena adanya sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal yang andal sangat diperlukan bagi suatu organisasi karena semakin besar dan kompleks serta pengembangan pesat teknologi informasi yang ada dapat memberikan keuntungan tetapi pada sisi lain juga dapat meningkatkan resiko pengendalian dan keamanan (Mahmudi, 2011 : 251).

Menurut penelitian Mei Sari Simatupang (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah” (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur)**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan membuat rumusan masalah yang akan diteiti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengeloaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemerintah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dan untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai sistem pengendalian internal pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi didalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal Pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, JL KH Abdullah Bin Nuh No 15, Sawah Gede, Kec. Cianjur, Kab Cianjur, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari Oktober 2019 hingga Januari 2020

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Sistem merupakan gabungan beberapa sistem kecil yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan (Tafsir,2015:13). Menurut Mardi (2011:3) sistem merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berintegrasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang ditentukan. Sedangkan menurut Romney et al (2017: 3) sistem adalah dua atau lebih dari serangkaian atau komponen yang saling berinteraksi dan terdiri dari subsistem yang lebih kecil untuk membentuk sistem yang lebih besar yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas, maka sistem adalah gabungan, kesatuan atau serangkaian komponen dari beberapa bagian kecil yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan.

2.1.1.2 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu sistem yang meliputi suatu struktur, kebijakan, dan prosedur dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi aset atau kekayaan organisasi untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh karyawan. (Mardi, 2011:59; Hery,2014:12).

2.1.1.3 Pengertian Sistem pengendalian internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh eksekutif dan seluruh pegawai di dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Indra Bastian,2011:7; PP No 60 tahun 2008).

2.1.1.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.1.1.5 Komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Unsur Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Menurut Mahmudi (2011:253) pengendalian memiliki keterkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi oleh karena itu lingkungan

pengendalian merupakan elemen terpenting dalam unsur- unsur lainnya dalam pengendalian.

Komitmen, peran, dan keterandalan dari pemimpin merupakan prinsip pengendalian yang disebut sebagai *tone from the top*, didalam menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif, mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat dibutuhkan adanya dukungan dari Pimpinan Instansi Pemerintah dan dilakukan oleh seluruh pegawai. Hal ini dapat terwujud melalui: (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008).

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
 - b. Komitmen Terhadap Kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang Kondusif
 - d. Pembentukan Struktur Organisasi
 - e. Pendelegasian Tugas dan Wewenang
 - f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan SDM
 - g. Perwujudan Peran Pengawas Internal
2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib untuk melakukan penilaian resiko. Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri atas:

- a. Identifikasi Resiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah

- 2) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- 3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

b. Analisis risiko

Dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang diterima diterapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi :

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian Intern serta transaksi kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut Mahmudi (2011:257) informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari elemen sistem pengendalian internal lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik dalam rangka. Informasi dan Komunikasi juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapat alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan, atau antara karyawan. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

Selain itu informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa komplain dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasikan ke pimpinan serta direspon dengan cepat. Pimpinan (manajemen) di semua level wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk waktu yang tepat serta efektif.

5. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem

pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit revidi lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

2.1.1.6 Komponen pengendalian internal COSO

Kerangka kerja pengendalian internal dikeluarkan oleh *Committee of sponsoring Organizations (COSO)*. Komponen pengendalian internal COSO meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Hery,2014: 134).

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian meliputi tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Sikap manajemen merupakan inti dari keberhasilan dalam pengendalian entitas secara efektif.

Subkomponen dari lingkungan pengendalian , yaitu sebagai berikut:

a. Integritas dan Nilai-Nilai Etis

Terkait dengan adanya tindakan dari manajemen untuk mencegah adanya tindakan karyawan yang tidak jujur, illegal, atau tidak etis. Sosialisasi mengenai nilai-nilai entitas yang harus dijunjung tinggi serta standar perilaku yang harus dipegang teguh dapat digunakan dalam pengendalian ini untuk dijalankan oleh seluruh karyawan. Standar etika atau perilaku tertuang dalam ingritas dan nilai-nilai etis ini.

b. **Komitmen Pada Kompetensi**

Meliputi kompetensi yang harus dipenuhi dalam pekerjaan tertentu yang menjadi syarat pertimbangan manajemen. Tugas dan pekerjaan setiap karyawan diharapkan dapat dilakukan setiap karyawan sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.

c. **Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit**

Jalannya kegiatan entitas yang dilakukan atau dikelola manajemen diawasi oleh dewan komisaris yang mewakili pemegang saham. Dewan komisaris harus dapat memastikan bahwa manajemen mengimplemantasikan pengendalian internal dan pelaporan secara benar. Komite audit dibentuk dan diberikan tanggung jawab dalam mengawasi manajemen dalam proses pelaporan keuangan entitas.

d. **Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen**

Arti penting pengendalian internal harus disampaikan oleh manajemen melalui prinsip dan sikapnya bagi para karyawan.

e. **Struktur organisasi**

Setiap divisi atau bagian dalam struktur organisasi menunjukkan seberapa besar tanggung jawab dan kewenangan yang harus dijalankan.

f. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas)

Pengendalian tidak dapat berjalan dengan baik apabila terdapat karyawan yang tidak kompeten tidak jujur sehingga dapat merusak sistem pengendalian yang ada.

2. Penilaian Resiko

Melakukan identifikasi dan analisis resiko terkait penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Aktivitas pengendalian

Merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk menjamin bahwa tindakan telah dilakukan dalam mengatasi resiko bahwa tujuan entitas dapat tercapai. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri atas:

a. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas adalah adanya pemisahan fungsi dan pembagian kerja yang meliputi: (1) pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula (2) harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset dengan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik (operasional).

b. Otorisasi yang Tepat atas Transaksi

Transaksi yang diotorisasi dengan tepat dapat membantu dalam berjalannya pengendalian dengan baik. Karakteristik yang dapat dilakuakn dari pengendalian internal adalah adanya penetapan tanggung jawab ke masing – masing karyawannya. Penetapan tanggung jawab dapat dilakukan agar masing masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas – tugas yang telah dipercayakan

kepadanya. Pengendalian atas Pekerjaan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan oleh satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah tugas atau pekerjaan dalam melakukan otorisasi atas transaksi.

c. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Transaksi yang akan dicantumkan dan diikhtisarkan berasal dari objek fisik yang merupakan dokumen atau catatan. Dokumen ini sangat penting dalam mencatat transaksi sebagai bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi serta dokumen ini diperlukan dalam mengendalikan aset.

d. Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan

Proses pencatatan akuntansi dan operasi normal bisnis dapat terganggu jika pengendalian internal atas aset dan catatan tidak terlindungi dan diamankan sebagaimana mestinya.

e. Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal

Pengecekan independen atau verifikasi internal dapat dilaksanakan dalam sistem pengendalian internal hal ini berkaitan dengan peninjauan uang, perbandingan, dan pencocokan data yang disiapkan oleh karyawan lainnya berbeda.

4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu (1.) transaksi yang dicatat memang ada, (2) transaksi yang ada sudah dicatat, (3) transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar, (4) transaksi yang dicatat diposting dan diikhtisarkan dengan

benar,(5.) transaksi diklasifikasi dengan benar, dan (6.) transaksi dicatat pada tanggal yang benar.

5. Pemantauan

Berkaitan dengan aktivitas pemantauan oleh manajemen terhadap mutu pengendalian internal untuk memastikan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana mestinya dan dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan.

2.1.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Halim (2014:130) Efektivitas adalah suatu ukuran didalam suatu perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, maka jika organisasi tersebut telah mencapai kegiatan yang telah ditentukannya maka dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan tersebut telah berjalan dengan efektif. Sementara menurut Mardiasmo (2018: 168) efektifitas adalah ukuran keberhasilan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, artinya suatu organisasi dikatakan efektif ketika perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Dari uraian diatas, maka efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan, jika perusahaan dapat mencapai tujuan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan efektif.

2.1.2.2 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban bagi daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan didalamnya yang dapat digunakan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (PP No 58 tahun 2005).

2.1.2.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan atau kegiatan dalam keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Siregar,2018:12; PP No 58 tahun 2005).

2.1.2.4 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Menurut Baldic (2017:13) Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

2.1.2.5 Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012: 29) adapun prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas bermakna bahwa segala penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

2. *Value for Money*

Value for money adalah anggaran yang berbasis kinerja dan menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, dan efektif.

3. Kejujuran

Kejujuran bermakna bahwa kegiatan operasional dalam keuangan daerah harus diselesaikan oleh karyawan yang memiliki integritas yang tinggi dan jujur untuk mencegah adanya masalah korupsi.

4. Transparansi

Transparansi bermakna bahwa adanya kemudahan bagi publik untuk mendapatkan informasi sebagai bentuk keterbukaan pemerintah mengenai kebijakan pengeluaran daerah tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tertentu.

5. Pengendalian

Pengendalian bermakna bahwa adanya kontrol dari perencanaan pengeluaran dengan implementasi sebagai bentuk keterbukaan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya Mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| No | Penulis/Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1. | Mei Sari Simatupang (2017) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan terwujud dengan efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan suatu instansi. |
| 2. | Sinambow Gloria Injilita, Tantje Tinangon, dan Lidia Mawikere (2017) | Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado | Sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik. |

| No | Penulis/Peneliti | Judul | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|
| 3. | Dicka Bella Murtika Sari, Anita Wiyanti, dan Endang Masitoh (2017) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan diterapkannya sistem pengendalian intern, maka pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan komunikasi atas informasi secara efektif didalam pengelolaan keuangan daerah. |

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menunjukkan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian dalam kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu sistem pengendalian internal di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai efektivitas pengelolaan keuangan Negara.

Sistem pengendalian internal pemerintah yang merupakan pedoman pengendalian bagi pelaksanaan kegiatan dalam instansi pemerintah. Didalam

sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Didalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik dibutuhkan suatu sistem yang sangat penting yaitu sistem pengendalian internal. Suatu sistem pengendalian internal dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas tata kelola dalam suatu organisasi (Mahmudi 2013:265).

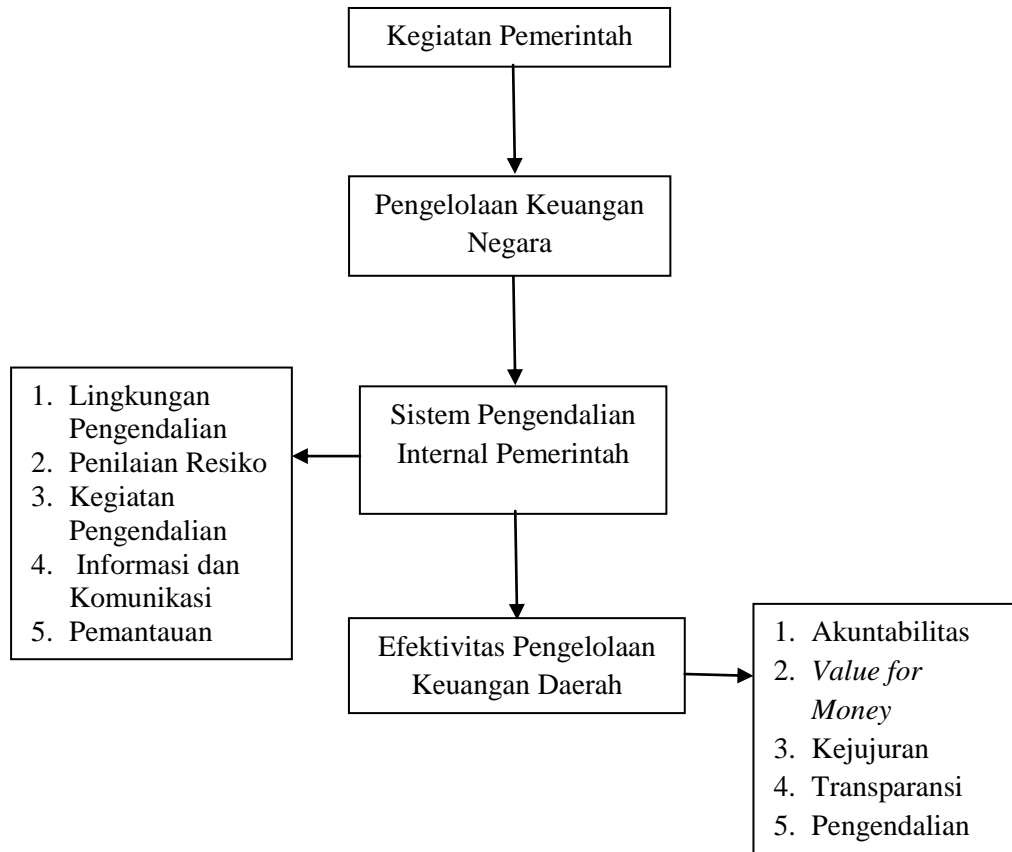
Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dibutuhkan untuk mempekuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal dilingkungan instansi pemerintah (Mahmudi 2013:258).

Efektivitas adalah suatu ukuran didalam suatu perencanaan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkannya, maka jika organisasi tersebut telah mencapai kegiatan yang telah ditentukannya maka dapat dikatakan bahwa program yang dijalankan tersebut telah berjalan dengan efektif (Halim dan kusufi 2014:130).

Kegiatan didalam pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Iqbal, 2012: 24). Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial

didukung oleh adanya pengelolaan keuangan yang baik. (Halim dan Iqbal, 2012: 20).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mei Sari Simatupang (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan efektif apabila organisasi mampu untuk menciptakan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan instansi. Selain itu, hasil penelitian dilakukan oleh Sinambow Gloria Injilita, Tantje Tinangon, dan Lidia Mawikere (2017) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado menunjukkan hasil bahwa Sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang baik. Lalu, berdasarkan hasil penelitian Dicka Bella Murtika Sari, Anita Wiyanti, dan Endang Masitoh (2017) menunjukkan hasil bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan di terapkannya sistem pengendaian intern, maka pemerintah dapat mewujudkan komunikasi atas informasi secara efektif didalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang diuraikan maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah (X) dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

3.1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

3.1.2.1 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur.

“Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan professional untuk tercapainya pemerintahan yang baik”

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

“Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta penetapan anggaran yang tepat waktu”

3.1.2.2 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

1. Kepala

Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan

2. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang belanja langsung, belanja tidak langsung serta dana perimbangan dan lain-lain.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta pelaksanaan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang akuntansi dan aset daerah.

6. UPTB
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dengan suatu tujuan dan adanya kegunaan tertentu. Data empiris (teramati) merupakan data yang diperoleh melalui penelitian yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Data yang valid pasti reliable dan obyektif. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

3.2.1 Metode yang digunakan

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri yaitu mendeskripsikan sistem pengendalian internal pemerintah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan analisis verifikatif adalah analisis model dan pembuktian yang berguna untuk mencari kebenaran dan hipotesis yang diajukan. Penelitian verifikatif dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh

sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Adapun variabel didalam penelitian terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variable terikat (dependent variable) sebagai berikut :

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah (X)

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|---|---|---|---------|
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X) | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP No 60 Thn 2008) | 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengandaian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan (PP No 60 Thn 2008) | Ordinal |
| Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) | Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, | 1. Akuntabilitas 2. Value For Money 3. Kejujuran 4. Transparansi 5. Pengendalian | Ordinal |

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|----------|--|---|-------|
| | penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP No 58 Thn 2005) | (Abdul Halim dan Muhammad iqbal, 2012:29) | |

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur yang jumlahnya 79 orang.

3.2.3.2 Sampel Penelitian

Didalam penelitian ini, pengumpulan data sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Non Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2018:84).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai. Sample dalam penelitian ini adalah kepala sub bagian serta karyawan yang berkepentingan dalam:

1. Melakukan pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan dana perimbangan.
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan verifikasi belanja dan pembiayaan, pencatatan dan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penatausahaan keuangan.
4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan, pengamanan dan penatausahaan aset daerah, serta pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah.

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

| Bidang | Unit | Jumlah |
|----------------|--|--------|
| Sekertariat | Kepala Sub-bagian Keuangan | 1 |
| | Kepala Sub-bagian Perencanaan | 1 |
| | Kepala Sub-bagian Umum dan Kepegawaian | 1 |
| | Pengevaluasi Program Kinerja | 1 |
| | Pengelola Surat | 1 |
| | Pengelola Gaji | 1 |
| | Penata Laporan Keuangan | 2 |
| Anggaran | Kepala Sub-bidang Belanja Langsung | 1 |
| | Kepala Sub-bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan | 1 |
| | Kepala Sub-bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah | 1 |
| | Pengelola Anggaran | 2 |
| | Pengelola sarana dan prasarana | 1 |
| | Pengelola Data Pencairan Dana | 1 |
| Perbendaharaan | Kepala Sub-bidang Verifikasi Belanja dan Pembiayaan | 1 |

| Bidang | Unit | Jumlah |
|------------------------------|---|--------|
| | Kepala Sub-bidang Pengelolaan Kas | 1 |
| | Kepala Sub-bidang Penatausahaan keuangan | 1 |
| | Pengolah Data Perbendaharaan | 3 |
| | Penata Keuangan (perbendaharaan) | 3 |
| | Pengelola Data Laporan Kas | 1 |
| Akuntansi dan Aset Daerah | Kepala Sub-bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 |
| | Kepala Sub-bidang Pengamanan dan Penatausahaan Aset Daerah | 1 |
| | Kepala Sub-bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah | 1 |
| | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris | 1 |
| | Pemeriksa Transaksi Keuangan | 1 |
| | Pemeriksa Pelaporan Transaksi Keuangan | 1 |
| | Penyusun Rencana Hasil Telaah Usul Pengadaan Barang | 1 |
| | Total | 32 |

Sumber : BPKAD

3.2.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer karena memperoleh data melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Cianjur. Menurut sekaran (2017:130) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi.

3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2018: 142) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Untuk mempermudah perhitungan setiap pertanyaan dari hasil kuesioner maka peneliti menggunakan skala likert.

Menurut sugiyono (2018:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Tabel 3.3

Penilaian Skala Likert

| Pernyataan | Skor |
|---------------------------|------|
| Sangat Setuju (SS) | 5 |
| Setuju (S) | 4 |
| Ragu-Ragu (RR) | 3 |
| Tidak Setuju (TS) | 2 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Sumber: Sugiyono (2018:94)

3.2.5. Metode Pengujian Data

Metode pengujian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.2.5.1 Uji Validitas

Didalam penelitian ini digunakan uji validitas untuk menguji sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Metode korelasi yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi *Pearson Product Moment*. Adapun untuk menguji korelasi dengan uji Pearson Product Moment rumusnya adalah:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien Korelasi

$\sum X$ = Jumlah skor keseluruhan untuk setiap item pertanyaan variabel X

$\sum Y$ = Jumlah skor keseluruhan untuk setiap item pertanyaan variabel Y

n = Jumlah Responden

Menurut Ghozali (2018: 34) uji signifikansi dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan degree of freedom = n-

2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka pertanyaan atau pernyataan dinyatakan valid
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka pertanyaan atau pernyataan dinyatakan tidak valid

3.2.5.2 Uji Realibilitas

Didalam penelitian ini digunakan uji realibilitas untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Sekaran (2017:39) reabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (tanpa kesalahan) dan karena itu menjamin konsistensi pengukuran disepanjang waktu serta diberbagai poin pada instrument tersebut. Dengan kata lain, reliabilitas suatu ukuran merupakan indikator stabilitas dan konsistensi dimana instrumen tersebut mengukur konsep serta menilai “kesesuaian” suatu ukuran. Uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, yaitu dengan bantuan program statistik *Program Social Science (SPSS) V.25 for windows*. Adapun rumus statistik yang digunakan yaitu:

$$r = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S^2} \right)$$

Keterangan :

r = Koefisien reliabilitas

k = Banyaknya jumlah item

$\sum S_i^2$ = Jumlah varian sektor item

S^2 = Varian total skor

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan SPSS versi 25.0 dan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* yang akan menghasilkan nilai alpha, suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018:46)

3.2.5.3 Method of Successive Interval (MSI)

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner berskala ordinal, sedangkan untuk melanjutkan analisis dibutuhkan skala interval, maka dari itu dilakukan pengukuran skala lanjutan sehingga didapat data berskala interval. Untuk itu digunakan metode successive interval (MSI) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Riduwan, 2014:30).

1. Menghitung frekuensi (f) setiap pilihan jawaban responden pada setiap pertanyaan atau pernyataan.
2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pertanyaan atau pernyataan, dilakukan perhitungan proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
3. Menentukan nilai batas Z (tabel normal) untuk setiap pertanyaan atau pernyataan dan setiap pilihan jawaban
4. Menentukan nilai densitas
5. Menentukan nilai interval rata-rata untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut:

$$\text{SCALE VALUE} = \frac{(\text{Density at lower limit}) - (\text{Density at upper limit})}{(\text{Area under upper limit}) - (\text{Area under lower limit})}$$

Keterangan :

Density at lower limit = Kepadatan batas bawah

Density at upper limit = Kepadatan batas atas

Area under upper limit = Daerah di batas atas

Area under lower limit = Daerah di batas bawah

Menentukan nilai transformasi $Y = SV + (1 - SV_{\min})$

3.2.6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat dikatehui dengan menggunakan grafik normal plot dengan melihat histogram dari residualnya.

Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain melihat grafik histogram, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif atau distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2018:161)

Menurut Ghozali (2018:163) dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Selain menggunakan analisis grafik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) uji K-S (Ghozali, 2018:166)

Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi dari uji normalitas di atas tingkat signifikansi 0,05 maka data terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi normalitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal, maka model regresi gagal memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas dengan menggunakan uji statistik Glejser yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolute residual dan meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel

independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem heteroskedstisitas.

3.2.7 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.2.7.1 Metode Analisis

Mengetahui sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur. Data data yang berkaitan dengan variabel tersebut dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan rumus. Setelah itu dilakukan teknik pengujian dengan menggunakan perangkat lunak Statistic Program Social Science (SPSS) V.25.0. Adapun penjelasan mengenai alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan analisis koefisien determinasi.

1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Analisis regresi bertujuan mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linear sederhana adalah regresi yang variabel bebasnya (vaiabel X) berpangkat paling tinggi satu. Tujuan utama dari penggunaan analisis ini adalah hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Untuk regresi linear sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel (variabel X dan Y), persamaan garis regresinya dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut (kesumawati dkk, 2017:113) :

$$Y' = a + bx$$

Keterangan:

Y' = Variabel terikat

X = Variabel bebas

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

2. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

K_d = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Berganda

3.2.7.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis menurut Sekaran (2017: 135) dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan antara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringang asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan

menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

1. Uji Parsial (t-test)

Uji parsial menurut Ghiozali (2018:179) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikan t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika nilai probabilitas signifikan $t < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial yaitu :

a. Menentukan H_0

1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

$H_0: \beta = 0$ Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah

$H_0: \beta \neq 0$ Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95% dengan taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$). Tingkat signifikansi 0,05 atau 5% artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan probabilitas 95% atau toleransi sebesar 5%

c. Menentukan nilai t hitung

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t_{tabel}

r = koefisien korelasi parsial

n = jumlah sampel

d. Kriteria untuk menerima atau penolakan hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
- 2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Penelitian ini adalah gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penyebaran kuesioner ditujukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur. Kuesioner dibagikan kepada para responden yang telah ditentukan sebelumnya.

4.1.1 Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | % |
|---------------|-----------|-------|
| Pria | 18 | 56,3% |
| Wanita | 14 | 43,8% |
| Total | 32 | 100% |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Kuesioner 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah pria sebanyak 18 responden atau sebesar 56,3% sedangkan sisanya wanita sebanyak 14 responden atau sebesar 43,8%

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Usia | Frekuensi | % |
|---------------------|-----------|------|
| 20 tahun – 30 tahun | 2 | 6,3% |

| Usia | Frekuensi | % |
|---------------------|-----------|-------|
| 31 tahun - 40 tahun | 16 | 50% |
| 41 tahun - 50 tahun | 14 | 43,8% |
| 51 tahun - 60 tahun | 0 | 0% |
| Di atas 60 tahun | 0 | 0% |
| Jumlah | 32 | 100 % |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 31 tahun – 40 tahun sebanyak 16 responden atau sebesar 50%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Frekuensi | % |
|---------------------|-----------|-------|
| SMA | 2 | 6,3% |
| D3 | 1 | 3,1% |
| S1 | 23 | 71,9% |
| S2 | 6 | 18,8% |
| S3 | 0 | 0% |
| Jumlah | 32 | 100 % |

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Strata 1 (S1) sebanyak 23 responden (71,9 %).

4.1.2 Hasil Uji Validitas

Validitas bertujuan untuk mengukur kualitas instrument yang digunakan dan menunjukkan tingkat validitas suatu instrumen, serta baik atau konsep yang dapat didefinisikan oleh suatu ukuran. Statistik yang digunakan dalam pengujian validitas ini yaitu dengan menggunakan korelasi *Pearson product moment* data yang diukur merupakan data interval. Pengujian signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika positif dan $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka *item* dapat dinyatakan valid. Sedangkan jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka *item* dapat dinyatakan tidak valid. Nilai r tabel untuk

n = 32 dengan taraf signifikan 0,05% adalah 0,3494 hasil pengujian validitas adalah sebagai berikut:

a. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Hasil pengujian validitas sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

| No Item | Koefisien Validitas | Nilai R Tabel | Keterangan |
|---------|---------------------|---------------|------------|
| 1. | 0.701 | 0,349 | Valid |
| 2. | 0,758 | 0,349 | Valid |
| 3. | 0,695 | 0,349 | Valid |
| 4. | 0,757 | 0,349 | Valid |
| 5. | 0,666 | 0,349 | Valid |
| 6. | 0,463 | 0,349 | Valid |
| 7. | 0,493 | 0,349 | Valid |
| 8. | 0,387 | 0,349 | Valid |
| 9. | 0,546 | 0,349 | Valid |
| 10. | 0.606 | 0,349 | Valid |

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2019

Dari hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas diatas yaitu untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X) dapatkan koefisien validitas antara 0,387 – 0,758 dimana *item* memiliki korelasi diatas 0,349 dikategorikan sebagai item valid dan layak diuji.

b. Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian validitas efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| No Item | Koefisien Validitas | Nilai R Tabel | Keterangan |
|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 11. | 0,496 | 0,349 | Valid |
| 12. | 0,539 | 0,349 | Valid |
| 13. | 0,359 | 0,349 | Valid |
| 14. | 0,552 | 0,349 | Valid |
| 15. | 0,670 | 0,349 | Valid |
| 16. | 0,718 | 0,349 | Valid |
| 17. | 0,358 | 0,349 | Valid |
| 18. | 0,763 | 0,349 | Valid |
| 19. | 0,592 | 0,349 | Valid |
| 20. | 0,627 | 0,349 | Valid |

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2019

Dari hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas diatas yaitu untuk variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah didapatkan koefisien validitas antara 0,358-0,763 dimana *item* memiliki korelasi diatas 0,349 dikategorikan sebagai item valid dan layak diuji.

4.1.3 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. perhitungan koefisien keandalan alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan program *Statistic Program Social Science (SPSS) V 25.00*.

Tabel 4.6

Hasil Uji Reabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

| Reliability Statistics | | |
|-------------------------------|---|------------|
| | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| Cronbach's Alpha | | |
| .809 | .810 | 10 |

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien reliabilitas pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,810 > 0,700$. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diterima atau diandalkan (reliable) karena nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,700$.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reabilitas Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| Reliability Statistics | | |
|-------------------------------|---|------------|
| | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| Cronbach's Alpha | | |
| .760 | .766 | 10 |

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien reliabilitas pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,766 > 0,700$. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diterima atau diandalkan (reliable) karena nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,700$.

4.1.4 Metode Suksesif Interval (MSI)

Data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini merupakan data ordinal, di mana untuk melakukan pengujian selanjutnya

diperlukan data interval. Oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil kuesioner tersebut perlu dilakukan perubahan atau transformasi menjadi data interval dengan menggunakan metode interval berurutan (*method successive interval*). Hasil dari transformasi data yang sebelumnya ordinal menjadi interval tersebut dapat dilihat pada data lampiran 8.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada BPKAD Kabupaten Cianjur

Untuk memudahkan penelitian dari jawaban responden, maka dibuat kriteria penelitian sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) : diberi bobot 5
- b. Setuju (S) : diberi bobot 4
- c. Ragu-Ragu (RR) : diberi bobot 3
- d. Tidak Setuju (TS) : diberi bobot 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi bobot 1

Jawaban responden kemudian dihitung berdasarkan rumus skor aktual dan dibandingkan dengan skor ideal untuk mendapatkan nilai presentase dari tanggapan responden. Skor aktual diperoleh melalui perhitungan seluruh jawaban responden sesuai bobot yang diberikan (1,2,3,4 dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan nilai tertinggi dikalikan jumlah responden. Adapun perhitungan presentase skor digambarkan dalam rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Langkah selanjutnya adalah mencari kriteria persentase penilaian dari setiap jawaban responden untuk memudahkan penilaian rata-rata tersebut

Tabel 4.8
Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden

| No | % Jumlah Skor | Kriteria |
|----|---------------|-------------|
| 1. | 0% - 19% | Tidak Baik |
| 2. | 20% - 39% | Kurang Baik |
| 3. | 40% - 59% | Cukup |
| 4. | 60% - 79% | Baik |
| 5. | 80% - 100% | Sangat Baik |

Sumber : (Ridwan dan Kuncoro,2014:22)

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pada BPKAD Kabupaten Cianjur

Berikut ini merupakan gambaran atau deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 32 responden mengenai sistem pengendalian internal pemerintah dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terdiri dari 5 indikator yang meliputi 10 pertanyaan. Berikut rekapitulasi jawaban responden indikator sistem pengendalian internal pemerintah.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

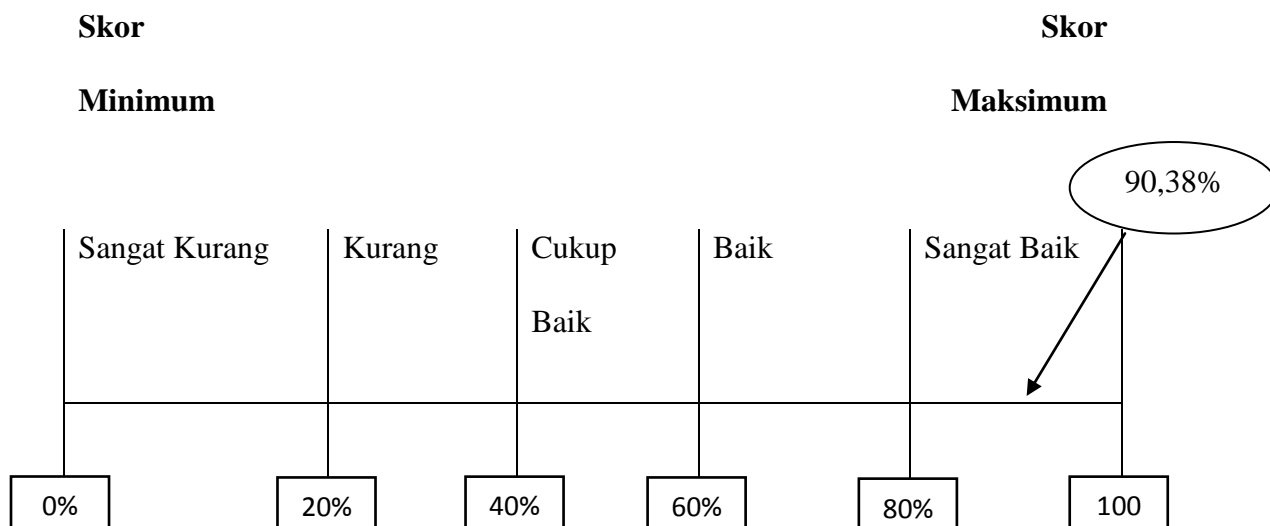
| Indikator | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | % |
|-------------------------|---|--------------------------|----|----|----|-----|-------------|------------|--------|
| | | SS | S | RR | TS | STS | | | |
| Lingkungan Pengendalian | Adanya aturan, perilaku dan etika yang sesuai dalam lingkungan instansi | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 93,75% |
| | Tugas,wewenang dan tanggung jawab setiap karyawan | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151 | 160 | 94,38% |

| Indikator | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | % |
|--------------------------|--|--------------------------|----|----|----|-----|-------------|------------|--------|
| | | SS | S | RR | TS | STS | | | |
| | tersusun jelas dalam struktur organisasi yang ada | | | | | | | | |
| Penilaian Resiko | Menetapkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 148 | 160 | 92,50% |
| | Adanya identifikasi resiko yang dapat terjadi dalam mencapai tujuan program | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 139 | 160 | 86,88% |
| Kegiatan Pengendalian | Menerapkan pemisahan fungsi yang memadai sehingga tidak terjadi <i>double job</i> | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 160 | 90,63% |
| | Memberikan akses atas sumber daya dan pencatatan hanya kepada karyawan yang berwenang | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143 | 160 | 89,38% |
| Informasi dan Komunikasi | Adanya alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 144 | 160 | 90% |

| Indikator | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | % |
|------------|--|--------------------------|-----|----|----|-----|-------------|------------|--------|
| | | SS | S | RR | TS | STS | | | |
| | keatasan atau antar karyawan dalam lingkungan instansi | | | | | | | | |
| | Mengelola sarana komunikasi dan memperbarui sistem informasi secara berkala | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 160 | 90,63% |
| Pemantauan | Menyelenggarakan pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin yang terkait dengan pelaksanaan tugas | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145 | 160 | 90,63% |
| | Menanggapi temuan dan menindaklanjuti atas kemangkiran yang terjadi | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 136 | 160 | 85% |
| Total | | 174 | 138 | 8 | 0 | 0 | 1446 | 1600 | 90,38% |

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1446 dengan nilai presentase yang diperoleh 90,38%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berada pada kriteria sangat baik.



Gambar 4.1

Garis Kontinum Kategori Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sumber : Riduwan dan Kuncoro,2014:22

2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pada BPKAD Kabupaten Cianjur

Berikut ini merupakan gambaran atau deskripsi mengenai hasil penelitian terhadap 32 responden mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terdiri dari 5 indikator yang meliputi 10 pertanyaan. Berikut rekapitulasi jawaban responden indikator sistem pengendalian internal pemerintah.

Tabel 4.10

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| Indikator | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | % |
|---------------|--|--------------------------|----|----|----|-----|-------------|------------|--------|
| | | SS | S | RR | TS | STS | | | |
| Akuntabilitas | Adanya bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang disajikan dalam | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139 | 160 | 86,88% |

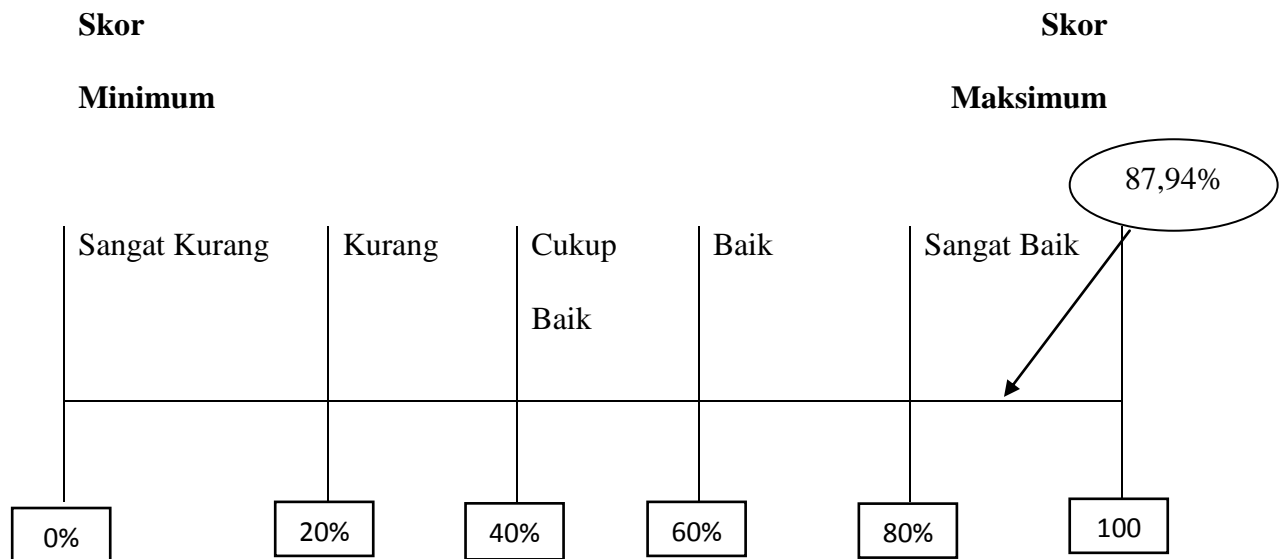
| Indikator | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | % |
|------------------------|---|--------------------------|----|----|----|-----|-------------|------------|--------|
| | | SS | S | RR | TS | STS | | | |
| | bentuk laporan | | | | | | | | |
| | Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan | 17 | 14 | 0 | 1 | 0 | 143 | 160 | 89,38% |
| <i>Value For Money</i> | Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 143 | 160 | 89,38% |
| | Seluruh elemen dalam instansi memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya instansi | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 145 | 160 | 90,63% |
| Kejujuran | Melakukan penyajian informasi sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 142 | 160 | 88,75% |
| | Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan intergritas | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 141 | 160 | 84,38% |

| Indikator | Pernyataan | Skor Tanggapan Responden | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | % |
|--------------|---|--------------------------|-----|----|----|-----|-------------|------------|--------|
| | | SS | S | RR | TS | STS | | | |
| | dalam bekerja | | | | | | | | |
| Transparansi | Adanya keterbukaan instansi dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap elemen masyarakat | 5 | 18 | 8 | 1 | 0 | 123 | 160 | 76,88% |
| | Adanya publikasi dokumen ke publik melalui website resmi instansi | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 135 | 160 | 84,38% |
| Pengendalian | Adanya evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 93,75% |
| | adanya tindaklanjut dan antisipasi langkah kedepannya atas evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 146 | 160 | 91,25% |
| Total | | 150 | 156 | 8 | 6 | 0 | 1407 | 1600 | 87,94% |

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1407 dengan nilai presentase yang

diperoleh 87,94%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berada pada kriteria sangat baik.



Gambar 4.2

Garis Kontinum Kategori Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Riduwan dan Kuncoro,2014:22

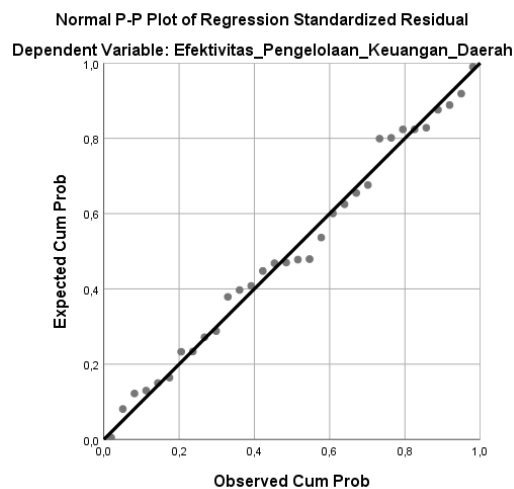
4.2.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Data-data bertipe skala pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengikuti kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas *residual* adalah dengan melihat grafik *histogram* yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun demikian,

hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Selain dengan melihat grafik, secara *histrogram* ataupun melihat normal *probability plot*, salah satu cara melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* digunakan untuk uji statistik apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan ketentuan jika nilai signifikansi Uji *kolmogorov smirnov* lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan (0,05), maka data terdistribusi secara normal. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan normal *probability plot*, grafik histogram dan Uji *kolmogorov smirnov*.



Gambar 4.3

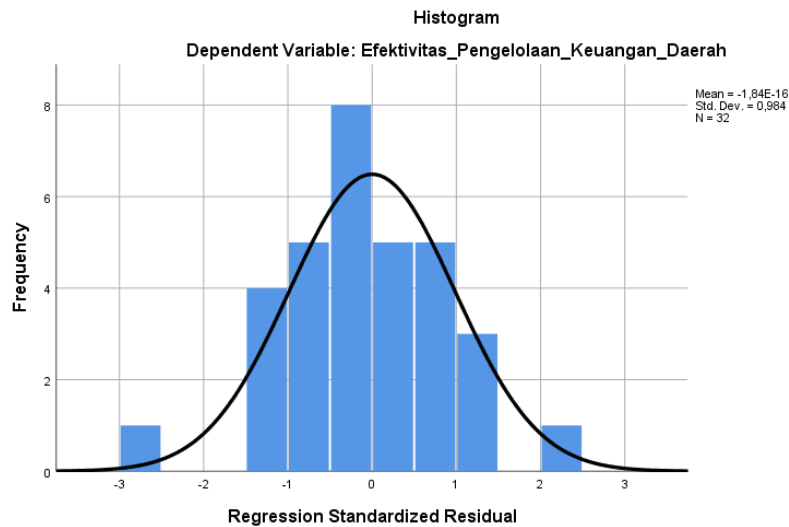
Grafik Normal P-Plot

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Sebaran distribusi data dapat dilihat dengan menggunakan grafik *normal probability plot*. Dilihat dari grafik *normal probability plot*, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan menunjukkan garis *diagonal*

yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan garis probabilitas pengamatan. Nilai *normal probability plot* terletak disekitar garis *diagonal*, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data adalah normal.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan tentang hubungan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.



Gambar 4.4

Histogram Uji Normalitas

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Dalam hal ini data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas selanjutnya dilakukan dengan uji *Kolmogorov smornov* satu arah. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 = 0$, sampel terdistribusi normal

$H_1 = 0$, sampel tidak terdistribusi normal.

Dasar keputusan normal atau tidaknya adalah sebagai berikut:

Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Tabel 4.11
Kolmogrov Smirnov Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|--|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 32 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 3,36163223 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,084 |
| | Positive | ,084 |
| | Negative | -,084 |
| Test Statistic | | ,084 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogrov Smirnov* didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Untuk menguji heteroskedastisitas cara yang digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau

tidak, adalah dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut dan meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat problem heteroskedstisitas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | ,157 | 1,580 | | ,099 | ,921 |
| | SPIP | ,117 | ,074 | ,277 | 1,578 | ,125 |

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki signifikansi sebesar 0,125. Dari nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Untuk regresi linear sederhana, yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel (variabel X dan Y), persamaan garis regresinya dapat ditulis dengan menggunakan rumus $Y' = a + bx$ (kesumawati dkk, 2017:113)

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 12,372 | 2,635 | | 4,696 | ,000 |
| | SPIP | ,657 | ,124 | ,696 | 5,311 | ,000 |

a. Dependent Variable: Efektivitas_Pengelolaan_Keuangan_Daerah

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diperoleh persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = 12.372 + 0,657X$$

a = 12.372 artinya, jika Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X) bernilai 0 (nol), maka variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) bernilai 12.372

b = 0,657 artinya, jika sistem pengendalian internal pemerintah (X) meningkat sebesar satu satuan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,657 satuan.

4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi. Berikut hasil yang diperoleh dari koefisien korelasi dan determinasi untuk mengetahui tingkat keeratan dan besaran pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.14
Analisis Koefisien Determinasi

| Model Summary^b | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,696 ^a | ,485 | ,467 | 3,41720 |
| a. Predictors: (Constant), SPIP | | | | |
| b. Dependent Variable: Efektivitas_Pengelolaan_Kuangan_Daerah | | | | |

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.14 nilai *R square* atau koefisien determinasi adalah 0,485 yang menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 48,5%. Dengan kata lain sistem pengendalian internal pemerintah memberikan kontribusi atau dijelaskan sebesar 48,5% terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan 51,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Parsial (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial atau antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.15
Hasil Uji t (Parsial) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 12,372 | 2,635 | | 4,696 | ,000 |
| | SPIP | ,657 | ,124 | ,696 | 5,311 | ,000 |

a. Dependent Variable: Efektivitas_Pengelolaan_Keuangan_Daerah

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, maka diperoleh t_{hitung} untuk sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 5,311 dengan variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan arah positif karena telah memenuhi syarat yaitu nilai t_{hitung} sebesar 5,311 $> t_{tabel}$ sebesar 2,039.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan kategori sangat baik yaitu dengan persentase 90,38%.

Sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur diukur dengan indikator Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta pemantauan. Berdasarkan evaluasi model pengukuran secara keseluruhan dari 5 indikator dan 10 pertanyaan tersebut telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur dianggap sangat baik karena:

- a. Indikator lingkungan pengendalian yang menunjukkan dalam instansi telah menerapkan adanya aturan, perilaku, dan etika yang sesuai lingkungan instansi serta tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap karyawan telah tersusun jelas dalam struktur organisasi yang ada.
- b. Indikator penilaian resiko yang menunjukkan bahwa adanya menetapkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam lingkungan instansi serta adanya identifikasi resiko yang dapat terjadi dalam mencapai tujuan program.

- c. Indikator aktivitas pengendalian yang menunjukkan bahwa dalam lingkungan instansi telah menerapkan adanya pemisahan fungsi yang memadai sehingga tidak terjadi double job dan akses atas sumber daya dan pencatatan diberikan hanya kepada karyawan yang berwenang.
- d. Indikator informasi dan komunikasi yang menunjukkan bahwa dalam lingkungan instansi telah menerapkan adanya alur informasi yang jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan keatasan atau antar karyawan dalam lingkungan instansi serta adanya pengelolaan sarana komunikasi dan memperbarui sistem informasi secara berkala.
- e. Indikator pemantauan yang menunjukkan bahwa dalam lingkungan instansi telah diterapkannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

4.3.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kategori sangat baik yaitu dengan persentase 87,94%.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur diukur dengan indikator Akuntabilitas, *Value for Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengendalian.

. Berdasarkan evaluasi model pengukuran secara keseluruhan dari 5 indikator dan 10 pertanyaan tersebut telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur dianggap sangat baik karena:

- a. Indiator akuntabilitas yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan ditandai dengan adanya bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang disajikan dalam bentuk laporan serta pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan yang telah dilakukan.
- b. Indikator *value for money* yang menunjukkan bahwa dalam Pengelolaan keuangan telah dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target dan seluruh elemen dalam instansi memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya instansi.
- c. Indikator kejujuran yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah telah tercermin didalam melakukan penyajian informasi yang sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku serta seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan intergritas dalam bekerja.
- d. Indikator transparansi yang menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah telah diwujudkan dengan adanya publikasi dokumen ke publik melalui website resmi instansi.

- e. Indikator pengendalian yang menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari adanya evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta adanya tindaklanjut dan antisipasi langkah kedepannya atas evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

4.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.15 untuk hasil uji statistik t (parsial) pada model regresi menunjukkan bahwa t_{hitung} yang diperoleh variabel sistem pengendalian internal pemerintah adalah 5,311 Nilai ini telah dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,039 dan menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 5,311 \geq t_{tabel} = 2,039$ yang artinya bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan tingkat nilai signifikansi $\leq 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Sistem pengendalian internal pemerintah dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah karena berdasarkan hasil diperoleh bahwa jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian internal diperoleh hasil sangat baik artinya dari 5 indikator dalam sistem pengendalian internal pemerintah telah dilaksanakan dengan sangat baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur serta berdasarkan hasil diperoleh bahwa jawaban responden terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh hasil sangat baik artinya dari 5 indikator dalam

efektivitas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan sangat baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Menurut Sinambow Gloria Injilita dkk (2017) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat terwujud dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik. Sedangkan menurut Dicka Bella Murtika Sari dkk (2017) menyatakan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern, maka pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan komunikasi atas informasi secara efektif didalam pengelolaan keuangan daerah.

Dan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mei Sari Simatupang (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan terwujud dengan efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan suatu instansi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sudah sangat baik, artinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur telah efektif dalam menerapkan dan menjalankan sistem pengendalian internal pemerintah.
2. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sudah sangat baik, artinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur telah efektif dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan arah positif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur telah memenuhi indikator baik pada sistem pengendalian internal pemerintah maupun pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur sebaiknya dalam lingkungan instansi melakukan tanggapan atas setiap temuan dan menindaklanjuti atas kemangkiran yang terjadi yang ditemui setelah dilakukannya pemeriksaan.
- a. Terkait dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Cianjur sebaiknya dilakukan peningkatan dalam hal transparansi dengan adanya keterbukaan instansi dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap elemen masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mengenai pengelolaan keuangan daerah serta sumber daya yang ada pada daerah tersebut.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama atau lokasi penelitian yang sama disarankan untuk meneliti dengan menggunakan variabel yang berbeda dengan dengan variabel dalam penelitian ini serta dapat menambahkan variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I.(2011). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bulan, S.G.I, Tinangon, J dan Mawikere, L. (2017). *Pengaruh Kualitas Pengelola dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado*. Vol 12 No 1, hlm 263-271.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Halim, A dan Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A dan Kusufi,M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery.(2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Hery.(2016). *Auditing dan Asurans*. Jakarta: PT Grasindo.
- https://bandung.bpk.go.id/?page_id=9863 diunduh pada tanggal 17 November 2019
- <https://cianjurkab.go.id/pemerintahan/badan-daerah-2/badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah/> diunduh pada tanggal 30 November 2019
- Kesumawati, N., Retta, A. M.,dan Sari, N. (2017). *Pengantar Statistika Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahmudi.(2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mardi.(2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo.(2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi.

Mei Sari Simatupang. (2017), *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Vol. 4 No 1, hlm 411- 425

Mulyadi.(2016). *sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal

Riduwan, D. dan Kuncoro, E. A. (2014), *Accounting Information System*, Mc Quorum Books.

Romney, M. B dan Steinbart, P. J. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Cetakan Keempat*. Terjemahan oleh Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari . Jakarta : Salemba Empat.

Sari, B. M. S, Wiyanti, A dan Masitoh, E. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah* . ISSN: 2337-4349, hlm 795-801.

Sekaran, U dan Roger, B. (2017). *Metode Peneitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, ed.ke-6. Terjemahan oleh Tim Editor,Jakarta: Salemba Empat.

Siregar, B. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Vol. 4 No 1, hlm 411-425.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Tafsir, A. (2015). *Sistem informasi manajemen: pendidikan agama islam*. Bandung: PT Remaja Roosdakarya Offset.